

Temuan BPK Rp 156 Miliar Gubernur Awasi Kinerja Bupati/Walikota

Andika Lay
Borneo Tribune, Pontianak

Realisasi dana anggaran pembangunan di Kalbar ditemukan 178 temuan oleh

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI. Kerugian daerah ditaksir Rp 156 miliar.

Menyikapi temuan BPK, Plh Sekda Kalbar, Kartius menjelaskan bahwa surat

....Ke Halaman -11

Gubernur Awasi Kinerja Bupati/Walikota

pertanggung jawaban (SPJ) dari Pemerintah Provinsi Kalbar belum masuk. "Saat dilakukan pemeriksaan oleh BPK, SPJ kita belum masuk, atau ada administrasi lain yang belum diserahkan," ungkapnya ditemui Selasa (11/10) di Pontianak.

Ketika dikonfirmasi dengan tuduhan aktivis mahasiswa yang tergabung di dalam Solmadapar ketika melakukan aksi di DPRD, Kartius menampik adanya mark up anggaran. "Mana ada lagi pejabat yang berani mark up anggaran, atau buat anggaran fiktif," jelasnya seraya menyatakan pemberantasan korupsi di Indonesia sampai ke akar-akarnya.

Pengawasan

Pelaksana Harian Sekretaris Daerah (Plh Sekda) Kalbar, Kartius mengatakan, penguatan fungsi Gubernur

sebagai Kepala daerah sekaligus sebagai Wakil Pemerintah di daerah dimaksudkan untuk memperkuat hubungan antartingkatan pemerintah, maka, hubungan Gubernur dengan Bupati/Walikota bersifat bertingkat.

"Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan sebaliknya, Bupati/Walikota dapat melaporkan permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah, termasuk hubungan antar Kabupaten/Kota," kata Kartius, Senin (11/10) saat membuka secara resmi Rapat Fasilitas Kesekretariatan Dekonsentrasi Pendanaan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Kalbar.

Dikatakan oleh Kartius, pemerintah menyadari,

pelaksanaan tugas Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah masih lemah, dan salah satu faktor utama yang menyebabkan lemahnya pelaksanaan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di daerah, karena keterbatasan dana anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disediakan untuk mendanai pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai pemerintah di daerah.

"Yang terjadi selama ini adalah pendanaan pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di daerah, dan dana pelaksanaan tugas berasal dari APBD," jelasnya.

Dirinya juga mengutip pernyataan Mendagri, bahwa masih lemahnya pelaksanaan tugas ini telah menimbulkan perencanaan dan pelaksanaan tugas di wilayah

provinsi belum dapat dilaksanakan secara sinergis.

"Ini dapat mengakibatkan upaya-upaya percepatan pembangunan yang telah dicangkan pemerintah pusat menjadi terhambat, dan target-target yang telah ditetapkan belum dapat dicapai dengan baik," kata Kartius, yang juga Asisten III Setda Kalbar.

Dijelaskan olehnya lagi, dengan mempertimbangkan besarnya konsekuensi-konsekuensi yang harus ditanggung akibat lemahnya pelaksanaan tugas Gubernur, maka, Mendagri memandang perlu untuk segera melaksanakan sub kegiatan penyelenggaraan tugas dan wewenang ini agar dapat dilaksanakan dengan baik. "Jadi menurut harapan Kemendagri sejalan dengan harapan kita semua yang notabene sebagai unsur aparatur negara dan pemerintah," ingatnya.